



Meningkatkan Persepsi Masyarakat dan Pengelola BUMDes tentang Pentingnya Kelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan

Improving Perception of Public and BUMDes Managers about the Importance of Environmental Conservation in Sidomulyo Sub District, South Lampung

Pitojo Budiono^{1*}, Feni Rosalia¹, Syarief Makhya¹, Hertanto¹, Tabah Mariyana¹, Ariska Warganegara¹, Nadia Khairunisa¹, dan Deni Afero¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Jl. S Brojonegoro 1 – Bandarlampung 35145

*Korespondensi: pitojo.budiono@fisip.unila.ac.id dan ptjbudiono@gmail.com

Diterima (Received):

21-Mei-2023

Diterima (Accepted):

20-Juni-2023

Terbit (Published):

21-Juni-2023

ABSTRAK

Persepsi lingkungan kelestarian lingkungan menjadi salah satu masalah bagi anggota pengelola BUMDes yang selama ini menjadi pendukung pembangunan ekonomi rakyat di pedesaan. Pembangunan ekonomi harus berjalan simultan dengan pembangunan ekologisnya. Hal ini nampaknya belum terjadi di Kecamatan Sidomulyo karena masih banyak sumberdaya alam yang rusak untuk mendukung pendapatan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (Prodi MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung (FISIP UNILA) perlu melakukan sosialisasi pentingnya kelestarian lingkungan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Setelah diberikan sosialisasi diharapkan akan meningkatkan persepsi para anggota pengelola BUMDes tentang hal ini. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan kepada 30 orang pengurus BUMDes pada tanggal 9 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Sidomulyo. Selain itu digunakan googleform berisikan materi sekaligus soal pre dan post test untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan persepsi mereka. Ateri dari 7 orang dosen dan 2 orang mahasiswa Prodi MIP dengan topik-topik tentang perencanaan, aspek ekonomi, penguatan sumberdaya manusia, kelembagaan, aspek budaya organisasi, aspek gender dan aspek politik. Google form diisi oleh 30 responden yang merupakan para pengelola BUMDes di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Berdasarkan hasil isian google form didapatkan persepsi pengelola BUMDes tentang penting kelestarian sumberdaya alam (SDA) dalam mendukung perekonomian desa. Dari 30 responden, sebanyak 47% menyatakan penting, dan 30 % menyatakan cukup penting, serta 23 % lainnya menyatakan tidak penting. Dari hasil tes, hasil terbanyak menyatakan bahwa kelestarian SDA penting dengan demikian desa melalui BUMDes harus menyusun strategi pembangunan yang benar-benar mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan SDA.



ABSTRACT

Kata Kunci:

BUMDes, Kelestarian SDA,
persepsi

Keywords:

BUMDes, Natural resources
sustainability, perception

Environmental perceptions of environmental sustainability are one of problems for BUMDes management members, which have been a model of people's economic development. Economic development must run simultaneously with ecological development. Government Science Master Study Program Team, Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung needs to disseminate this matter because this perception is important for BUMDes managing members. The socialization was carried out through a Googleform which contained material as well as test questions to find out their perceptions. The material distributed simultaneously with the implementation on May 9, 2023 via Googleform is material from 7 lecturers and 2 students with any related topics. The Googleform was filled in by 30 respondents who are BUMDes managers in Sidomulyo District, South Lampung. Based on the results of filling in the Googleform, it was found that the BUMDes manager's perception of the importance of preserving natural resources in supporting village economy. Of the 30 respondents, 47% said it was important, and 30% said it was quite important, and the other 23% said it was not important. Most results stated that natural resource sustainability is important, thus villages through BUMDes must develop a development strategy that truly considers environmental and natural resources sustainability.

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam (SDA) adalah hal penting dan juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Hal ini terkait dengan tingkat kemakmuran yang ada di keluarga inti. Suatu SDA idealnya memberikan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat agar bisa memberikan pertambahan nilai yang menguatkan modal dalam meningkatkan kompetitif pada aspek ekonomi para pihak bagi kemakmuran daerah tersebut. Diketahui bahwa 50% ekspor dari Indonesia didominasi hasil pengelolaan SDA [1]. Artinya, SDA terbukti mendukung perekonomian suatu daerah juga ditingkat nasional. Dengan demikian kelestarian SDA harus didukung semua lembaga dari tingkat tapak hingga nasional termasuk BUMDes di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.

Pembangunan berkelanjutan di suatu desa akan terkait juga dengan isu manusia berinteraksi juga memanfaatkan kekayaan lingkungan demi mendukung kesejahteraan generasi sekarang juga mendatang. Bila manusia kurang baik dalam mengelola SDA maka juga akan berdampak buruk bagi manusianya [2]. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya berkelanjutan yang mengatur sistem pengelolaan pertanian secara lestari dan merupakan suatu program pengelolaan SDA hayati dan bertujuan

efisiensi dalam pemenuhan keperluan banyak orang yang lestari dengan mengutamakan kondisi lingkungan. Dengan demikian unsur manusia memegang peranan penting.

Aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan SDA di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan sangat erat berhubungan dengan terbentuknya persepsi masyarakat dan anggota-anggota maupun pengurus lembaga BUMDes dan lembaga lainnya. Diketahui bahwa ada 256 BUMDes Lampung Selatan dengan kategori maju. Hal ini mengindikasikan sebagian besar BUMDes belum ada yang sebagai penggerak dan motivasi untuk sampai ke taraf maju. Oleh karena itu kondisi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena usaha ekonomi mikro yang terkait dengan pengelolaan SDA belum tergambarkan dalam proses ekonominya. Adanya pengelolaan SDA yang baik jika persepsi masyarakat juga lembaganya juga baik terutama pemahaman dan persepsinya tentang pentingnya kelestarian SDA [3].

Faktor penting dalam mendukung kelestarian SDA adalah pemahaman masyarakat untuk menjaga SDA terutama yang terancam kerusakannya. Jika diketahui potensi BUMDes dan sinkron dengan kekuatan ekonomi sumber daya alam akan baik, salah satu alasannya bahwa di Lampung Selatan merupakan salah satu lokasi dari program perhutanan sosial khususnya dengan sudah diterapkannya hutan desa. Keikutan desa dalam memanfaatkan SDA sangat berpotensi untuk menyejahterahkan rakyatnya. Selama ini aktivitas BUMDes belum sinkron dengan program hutan desa yang ada. Terkait dengan hal ini kegiatan PKM di bidang pemerintahan salah satunya menekankan pada perencanaan SDM dan lembaga yang harus dikuatkan dengan disertai adanya peningkatan kemampuan analisis kebijakan sehingga pesan pemerintah dapat di terjemahkan maksud dan tujuannya secara tepat. *Output* yang diharapkan dari PKM yaitu kedepannya akan ada pengaturan pembagian tugas para pamong desa yang jelas dan tegas misal dengan terbitnya Peraturan Desa (Perdes). Adanya kebijakan khusus ini, maka akan dapat mendukung penyusunan strategi pembangunan desa yang selaras dengan program pemerintah di tingkat kabupaten maupun propinsi, yang tentunya menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa PKM bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan dengan aspek ekologi di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yaitu dengan mengetahui persepsi masyarakat berdasarkan SDA yang bernilai terancam dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Penting adanya persepsi tepat atas isu ini untuk para anggota BUMDes maka Tim Prodi MIP

.....

melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada awal bulan Mei 2023.

METODE

Program PKM ini dilaksanakan oleh Tim Dosen dan mahasiswa Prodi MIP FISIP Unila melalui distribusi *Googleform* (GF) baik itu materi maupun kuesioner. Distribusi GF kepada 30 orang tokoh BUMDes di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023. Topik materi yang disusun oleh 7 orang dosen dan 2 orang mahasiswa yang diedarkan melalui GF meliputi perencanaan, aspek ekonomi, penguatan sumberdaya manusia, kelembagaan, aspek budaya organisasi, aspek gender dan aspek politik. Metode ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan para tokoh BUMDes tersebut. Hasil isian di GF kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan sebagai suatu gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan hasil suatu proses pengorganisasian diikuti dengan penginterpretasian atas adanya stimulus yang diterima oleh suatu indra manusia supaya stimulus yang dikirim dapat dipahami oleh semua pihak baik individu ataupun kelompok [4]. Lebih lanjut [5] mengatakan bahwa suatu persepsi secara terpisah/ sendiri akan dipengaruhi oleh berbagai aspek baik eksternal maupun internal. Khusus untuk aspek internal yaitu kecerdasan, emosi, atensi, pembelajaran, juga kemampuan indera yang mereka miliki. Berbeda dengan aspek eksternal yaitu unsurnya berkelompok, bisa merupakan pengalaman pada masa yang lalu, ataupun latar belakang berdasarkan aspek sosial budaya masyarakat. Selanjutnya dua pakar ini juga menyatakan bahwa suatu persepsi akan dapat menjadi hal sangat penting untuk mempengaruhi perilaku atau perilaku suatu pihak atau seseorang untuk mendukung kelestarian lingkungan. Persepsi positif umumnya cenderung akan bisa mendukung upaya yang keberlanjutan berbasis ekologi [6]. Peran serta masyarakat diperlukan dalam kaitannya agar mampu menunjukkan adanya kepentingan maupun keterkaitannya dengan upaya mendukung keberlanjutan atau kelestarian lingkungan yang dilakukan kelompok masyarakat atau perorangan [7].

Analisis Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang ada terkadang tidak memilahkan masalah publik dan privat dalam konteks ruang, dalam konteks BUMDes,

mengoperasionalkan kebijakan pemerintah yang dukung dan mendorong BUMDes, maka pengelola membutuhkan kemampuan dalam analisis kebijakan pemerintah dalam praktik oprasional tidaklah mudah. Menurut [8] mengatakan bahwa Saxonhouse menyatakan bahwa batas antara dua hal tersebut tidak absolut. Hubungan atau keterkaitan antara ruang privat dan publik cukup kompleks juga mencerminkan adanya ketidaktergantungan atau interdependensi. Faktor ekonomi keluarga dan masyarakat sering diidentikan dengan konflik antara kepentingan umum atau publik dan privat yang kadang saling bersebrangan atau bertentangan. Untuk Ketegangan yang terjadi antara publik dan privat dalam memecahkan ketegangan antara kepentingan keduanya yaitu melalui campur tangan gagasan dari pasar. Lembaga BUMDes dapat menjadi lembaga media untuk memaksimalkan kepentingan individu dalam hal ini anggota dan juga berpromosi untuk kepentingan umum atau publik ketika harus memanfaatkan adanya kekuatan pasar [8]. Dengan adanya kebebasan individu untuk menentukan pilihan maka tentu saja harus dipertimbangkan akan memenuhi adanya keperluan individu yang sekaligus tentu akan mendukung adanya peningkatan ketersediaan barang publik yang menyertai kesejahteraan publik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat sebagai BUMDes merupakan realisasi yang tepat dari amanat UU Nomor 6 tahun 2014. Dengan demikian desa menjadi dasar hukum pengembangan desa lebih maju dan lebih mandiri dari segala sisi. Salah satu point penting dari undang undang ini, yakni yang merupakan asas yang mendasar untuk penyelenggaraan BUMDes yakni pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Selanjutnya pada pasal ini menyebutkan bahwa BUMDes penting untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, dan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Diketahui bahwa BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini dikuatkan dengan syarat modal usaha desa 51 % dan masyarakat 49 % melalui penyertaan modal atau saham. Pada tahap operasional, BUMDes menggunakan falsafah bisnis yang berakar pada kearifan lokal (*local wisdom*), dan keuntungan yang didapatkan akan meningkatkan kesejahteraan penyerta modal dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*) [9].

Pada sisi pemerintahan, lembaga perekonomian BUMDes, menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat desa dan kabupaten. Kondisi ini

merupakan salah satu kebijakan pemerintah bahwa pembangunan yang dimulai dari bawah salah satunya adalah melalui aneka kegiatan perekonomian yang di dampingi maupun yang digagas oleh pengelola BUMDes. Dalam program monitoring dilakukan secara bersama pemerintah dan masyarakat. Lembaga ekonomi rakyat yang berupa BUMDes di kelola dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntable dan sustainable [10]. Pada sisi lain, menurut [11], salah satu penyebab sulit berkembangnya BUMDes dan akan menjadikannya semakin lambat mencapai tujuannya adalah terjadinya karena proses urbanisasi di berbagai wilayah. Menurut [12], hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika harus menghidupkan ekonomi BUMDes terutama setelah pandemi Covid 19.

Kelestarian SDA

Kelestarian SDA dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes masih jarang dibahas dalam ranah pembahasan kinerja BUMDes, karena perspektif yang menempatkan ranah ekonomi dan keterlibatan masyarakat di bidang ekonomi menjadi sangat dominan. Disisi lain, perlu diingat bahwa konsep kelestarian pasti ada unsur ekonomi, sosial dan lingkungan. Demikian halnya seperti yang pernah diungkapkan [13], bahwa pemafaatan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam sangat utama bagi masyarakat desa, otomatis pengelolaan BUMDes ada keterkaitannya dengan tetap terjaganya kelestarian sumber daya alam.

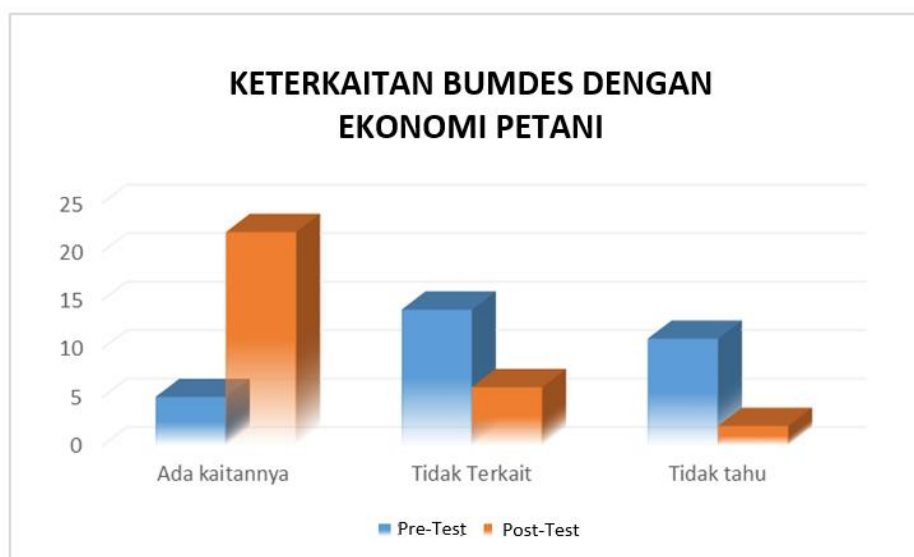
Hasil Kuesioner

Persepsi menjadi dasar untuk seseorang melakukan tindakan menjadi sangat penting dan strategis. Persepsi indikator tata kelola sumber daya alam dapat menjadikan dukungan pengelolaan BUMDes. Pengabdian pada masyarakat terkait tata kelola BUMDes di Lampung Selatan sangat penting. Dari data yang tersedia di BPS 2021 bahwa BUMDes di Lampung selatan berjumlah 256 BUMDes dan posisi yang berkembang di tingkat dasar 120 atau 46 % dan tumbuh 89 atau 34,7 % dan posisi berkembang 47 atau 18,4% dan dan tidak ada yang mempunyai posisi maju.

Persepsi Tokoh BUMDes tentang Keterkaitan Kelestarian SDA dan Tingkat Ekonomi Petani

Kegiatan ekonomi lokal pada tatakelola BUMDes menjadi penopang ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat adalah penting dan berkaitan

dengan kelestarian SDA. Diketahui bahwa sebagian tokoh BUMDes masih ada (5 %) yang kurang memperhatikan kelestarian SDA dan menganggapnya tidak penting dan tidak terkait dengan tingkat ekonomi petani. Meskipun demikian terbukti mayoritas tokoh BUMDes (22 orang atau 73%) menyatakan dominan dan ada keterkaitan peran BUMDes pada tahap awal pengembangan perekonomian desa berdasarkan kondisi kelestarian SDA nya. Adanya tokoh BUMDes yang masih berpersepsi tidak ada kaitan antara kelestarian SDA dengan tingkat ekonomi petani artinya masih tetap harus ada program khusus di wilayah-wilayah tersebut untuk memberikan pemahaman pentingnya SDA bagi para tokoh BUMDes. Hasil kuesioner juga menjadi indikasi masih perlunya penanganan dan dorongan motivasi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas BUMDes yang ada di Lampung Selatan. Kondisi ini terbukti dari hasil isian kuesioner yang telah diisi oleh para tokoh BUMDes Lampung Selatan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persepsi Tokoh BUMDes Lampung Selatan tentang pentingnya kelestarian SDA dalam mendukung tingkat perekonomian desa

Rekomendasi Pengembangan BUMDes Berdasarkan Hasil PKM

Memperhatikan kondisi BUMDes di Lampung Selatan berdasarkan hasil pelaksanaan PKM, Tim Prodi MIP FISIP Unila merekomendasikan langkah-langkah awal pengembangan BUMDes sebagai berikut: a) Segera menemukan tujuan sebenarnya dari pendirian setiap BUMDes, b) Membuat strategi sesuai dengan keadaan yang ada, dan c) penyusunan pengembangan lembaga sesuai dengan potensi SDA dan SDM serta kemampuan yang ada pada keduanya. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh [14], menurut Becker, pengertian perencanaan adalah suatu proses rasional untuk mempersiapkan masa depan. Lebih lanjut

menurut [14], seorang pakar bernama Alder mengatakan bahwa pengertian perencanaan suatu program adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai suatu lembaga pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Rekomendasi tersebut penting untuk mendukung tingkatan operasional kebutuhan BUMDes pengembangan organisasi dan pengembangan ekonomi di Lampung Selatan.

Pelaksanaan PKM prodi MIP dengan tema penguatan perencanaan dan analisis kebijakan dihadiri Kabid Pemberdayaan mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Camat Sidomulyo serta Kepala Desa Sidowaluyo yang menjadi tempat terselenggaranya pertemuan (Gambar 2 dan Gambar 3).



Gambar 2. Pembukaan dan sambutan



Gambar 3. Penyampaian materi dan foto bersama saat penutupan

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk mengembangkan BUMDes di Lampung Selatan. Berikut adalah rekomendasi Tim PKM Prodi MIP FISIP Unila, yaitu: 1) Langkah awal menemukan tujuan pendirian setiap BUMDes secara tepat, 2) Menyusun strategi yang sesuai

berdasarkan keadaan di lapang, dan c) pengembangan lembaga BUMDes sesuai kondisi SDA juga kemampuan SDM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan yang dalam dan setinggi tingginya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bapak camat Sidomulyo, Bapak Kepala Desa Sidowaluyo, dan Para pengelola BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putra, Antoni. *UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Halaman 601700. (11). 2020.
- [2] Alisjhabana, A.S, and Murniningtyas, E. "*Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia : konsep, target dan strategi implementasi (2nd ed.)*". Unpad Press. Bandung. 2018.
- [3] Salampessy, M.L., Aisyah, and Febryano, I.G. "Presepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Daerah Aliran Sungai". *Talenta Conference Series: Agricultural And Natural Resources (ANR)*, vol. 2, no. 1, pp. 11–17, 2019.
- [4] Virianita, R, Soedewo, T, Amanah, S., and Fatchiya, A. "Persepsi Petani Terhadap Dukungan Pemerintah Dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, vol. 24, no. 2, pp. 168–77, 2019.
- [5] Sudarma, I.M., and Wayan, W. "Persepsi Masyarakat Terhadap Ekosistem Daerah Aliran Sungai Ayung Menuju Sumberdaya Air Berkelanjutan". *Bumi Lestari Journal of Environment*, vol. 16, no. 2, pp 78, 2016.
- [6] Chili, N.S. "Perceptions And Attitudes Of The Community Towards Tourism Impacts And Sustainable Development. The Case Study Of Empophomeni In Pietermaritzburg (South Africa)". *Problems And Perspectives In Management*, vol. 13, no. 3, pp. 151–59, 2015.
- [7] Ronsumbre, V., Ihsannudin, I. "Persepsi Masyarakat terhadap Kondisi Sumber Daya Alam guna Mendukung Usaha Pertanian Berkelanjutan di Desa Duber, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori". *AGRISCIENCE*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [8] Parson, W. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Buku. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2015.
- [9] Rampengan, J.A., Lengkong, F.D., and Rares, J.J. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 74, 2019.
- [10] Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE Brawijaya. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. PP RPDN. Universitas Brawijaya. Malang. 2007.
- [11] Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M.S., and Gunawan, G. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten". *Umbara*, vol. 3, no. 1, pp. 34-43. 2020.
- [12] Sibarani, G.A., Kusuma, H.E., and Riska, A.S. "Three conceptual models of restorative environments based on user's restorative experience in the COVID-19

- pandemic period". *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, pp. 1-13, 2023.
- [13] Kunarto, K. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 17, no. 1, 2019.
- [14] Mulalinda, S.N.D., Sumampow, I., and Kimbal, A. "Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro". *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 2, 2021.